

INTISARI

Penanganan Permukiman kumuh sebagai upaya untuk mewujudkan kota yang inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan, sesuai dengan target SDG's ke-11. Banyak program penanganan permukiman kumuh di Indonesia terus dilakukan namun cenderung kurang memperhatikan aspek berkelanjutan. Salah satu program adalah Program NUSP-2. Program ini berbasis pemberdayaan masyarakat dan dilaksanakan di 20 kabupaten/kota di Indonesia, salah satunya adalah di Kota Semarang, yaitu Kawasan Permukiman Pesisir Bandarharjo, yang menjadi salah satu *pilot project* Program NUSP-2 pada tahun 2015. Keberhasilan penanganan permukiman kumuh tentunya tidak hanya dilihat pada keberhasilan pelaksanaan programnya saja, tetapi pada keberlanjutan penanganan secara holistik dilihat dari lingkungan, ekonomi, sosial dan kelembagaan.

Penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi penanganan permukiman kumuh dari aspek-aspek berkelanjutan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan berkelanjutan serta bagaimana prospek penanganan kawasan permukiman kumuh di kawasan pesisir. Pengumpulan data dilakukan melalui survey langsung, wawancara (*interview*) dan data-data sekunder penelitian dilapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari empat aspek berkelanjutan, hanya aspek sosial dan lembaga yang memenuhi prinsip berkelanjutan, sedangkan pada aspek lingkungan dan ekonomi program masih kurang memenuhi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sinergitas penanganan, peran stakeholde, konsistensi penanganan, keterlibatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat. Prospek pemeliharaan infrastruktur masih kurang pada RW.01, namun prospek rencana penanganan selanjutnya masih cukup baik dikarenakan adanya rencana-rencana penyelesaian dari Pemerintah.

Penelitian ini juga menunjukkan bawa pentingnya sinergitas dan kolaborasi stakeholder dalam perencanaan penanganan permukiman kumuh dikawasan pesisir, terutama pada penanganan skala permukiman dengan skala kota terkait bencana banjir rob. Rekomendasi penelitian ini adalah dalam menangani permukiman kumuh dikawasan pesisir diperlukannya penanganan rob secara struktural dan adanya sinergitas antara penanganan rob pada level kota maupun level kawasan, sehingga penanganan kawasan akan efektif bila dilakukan setelah terselesaikannya penanganan masalah banjir rob pada level kota. Selain itu perlu diperhatikannya peningkatan ekonomi masyarakat dan lembaga. Serta untuk menjamin konsistensi penanganan diperlukannya *baseline* data kumuh yang akurat dan diacu dalam perencanaan oleh seluruh stakeholder.

Kata kunci : permukiman kumuh, kawasan pesisir, berkelanjutan

ABSTRACT

Slums upgrading is an issue that continues to be a concern until now. It is part of the efforts to achieve inclusive, secure, resilient and sustainable cities and human settlements accordance to the 11th SDG's target. Many slums upgrading programs in Indonesia has been done, but tend to less effective and pay less on sustainable aspects. One of the programs is NUSP-2 Program. The program is based on community empowerment and implemented in 20 districts/cities in Indonesia, one of which is in the Semarang City, namely Bandarharjo Coastal Settlement Area, which became one of the pilot project NUSP-2 program in 2015. The success of slum upgrading is not only seen in the successful implementation of the program, but on the sustainability which includes environmental, economic, social and institutional dimensions.

This study aimed to evaluate the slum upgrading from sustainable aspects and identify the factors that affect the sustainability and how the prospect of sustainable slum upgrading especially in coastal areas. Data collected through direct surveys, interviews and secondary data research field. The method used in this research is qualitative method with descriptive analysis techniques.

The results of this study showed that of the four aspects of sustainability, only the social and institutional aspects that meet the principles of sustainability, while the environmental and economic aspects of the program were still lacking. Factors that influence the sustainable principles are the project synergy, the role of stakeholders, the project consistency, participation and community institutions. The prospects of Infrastructure maintenance are still not good at RW.01. While the prospect of sustainable slum upgrading is still quite good due to the government's settlement plans.

This study also shows the importance of the project synergy and collaboration of stakeholders in the planning of slum upgrading in coastal areas, especially related to the tidal flood disaster. The recommendation of this research it is necessary to handle tidal flood (rob) structurally and the synergy between handling rob at the city level and regional/settlement level, so that the slum upgrading of the settlement scale will be effective if done after the intervention of tidal flood in city scale. In addition program needs to improving the community and institutional economic. Also to ensuring consistency in handling the need for accurate slum data baselines and referred to in planning by all stakeholders.

Keywords: slum, coastal area, sustainability